



JOKOWI DINILAI CORENG DEMOKRASI

Guru-guru Besar UGM Desak DPR Bersikap

Jakarta, MIMBAR - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempolitisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pilpres 2024.

Jakarta, MIMBAR - Sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk guru-guru besar, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara Republik Indonesia (RI).

mengambil sikap dan langkah konkret merespons berbagai gejolak politik pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila. Hal ini demi memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.

Mereka mendesak DPR dan MPR

■ Bersambung ke Hal 11

Mahfud Resmi Mundur dari Kabinet

Medan, MIMBAR - Calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD resmi menyatakan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Maka hari ini

saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke presiden tentang masa depan politik saya yang belakangan menjadi perbincangan publik," kata Mahfud di Danau Tirta Gangga, Lampung Tengah, Lampung, Rabu (31/1).

Mahfud mengaku telah meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya besok (hari ini, red). Ia mengaku ingin pamit baik-baik.

"Saya akan pamit baik-baik, dan akan menyerahkan surat ini. Presiden baru ada di Jakarta Kamis," ujarnya.

Mahfud sebelumnya telah mengungkapkan rencana mundur dari jabatan Menko Polhukam. Rencana itu ia sampaikan dalam acara 'Tabrak Prof!' di Semarang,

■ Bersambung ke Hal 11



Rekam Jejak Mahfud

CAWAPRES nomor urut 3 Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) pada Rabu (31/1)

jelang Pilpres 2024. Menurut Mahfud, pengunduran dirinya itu demi menghindari konflik kepentingan di Pilpres 2024.

■ Bersambung ke Hal 11



Rombongan AMIN Tabrakan Beruntun

Sumenep, MIMBAR - Rombongan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengalami tabrakan beruntun saat berkampanye Pilpres 2024 di Sumenep. Kejadian itu berlangsung saat rombongan Anies-Cak Imin beranjak dari Graha Adi Poday. Mereka hendak sowan ke Pondok Pesantren Al Hamidy Banyuwang.

Saat melintas di Jalan Raya Pragaan, jalanan cukup sempit. Banyak masyarakat yang menyaksikan rombongan Anies-Cak Imin di pinggir jalan. Tiba-tiba beberapa mobil di bagian belakang berhenti mendadak. Mobil minibus yang mengangkut sejumlah wartawan terhimpit mobil di depan dan belakang.

■ Bersambung ke Hal 11



Anwar Usman Ngotot Tetap Jadi Ketua MK

Jakarta, MIMBAR - Hakim konstitusi Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dibatalkan. Anwar juga ingin kembali menduduki jabatan sebagai Ketua MK.

Hal itu tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar terhadap Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT. Anwar ingin PTUN mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

■ Bersambung ke Hal 11

Dugaan Pelanggaran Etika Akademik di UIN Sumut

Rektor Bentuk Tim Investigasi

Medan, MIMBAR - Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran etika akademik yang melibatkan sejumlah dosen.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

21 RAJAB 1445 H

Subuh : 05:22 WIB	Maghrib : 18:40 WIB
Zuhur : 12:42 WIB	Isha : 19:52 WIB
Ashar : 16:03 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Mengingat Kematian

Oleh Dr A Rasyid, MA

MENINGAT kematian merupakan hal penting dalam hidup ini. Sebab, dengan demikian akan menghilangkan arogansi keduniawian kita. Sehingga tidak lagi berani berbuat dosa yang merugikan dirinya sendiri. Orang yang senantiasa mengingat kematian lalu dia melaksanakan amal kebajikan, tergolong sebagai manusia yang cerdas, karena dia mampu berpikir lebih jauh ke masa depannya yakni kehidupan setelah kematian.

■ Bersambung ke Hal 11

Massa APDESI Demo di Senayan

Tuntut Revisi UU Desa

MASSA Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar unjukrasa di depan gedung DPR, Rabu (31/1). Demo yang menuntut revisi UU Desa itu sempat ricuh. Para pedemo mencoba merusak tembok Gedung DPR.

Salah seorang pedemo terlihat menggunakan sebuah palu berukuran cukup besar dan memukulnya ke arah tembok gedung. Alhasil, tembok pun berlobang imbas pukulan tersebut.

Tak hanya itu, pedemo juga memasang tali tam-

bang di pagar besi dan berupaya menariknya untuk merobohkan pagar tersebut.

Hingga saat ini demonstrasi masih berlangsung. Jalan Gatot Subroto arah Slipi juga masih ditutup untuk menghindari penumpukan kendaraan.

Massa aksi sempat merangsek ke ruas Tol Dalam Kota dan melakukan penutupan jalan. Namun aksi tersebut bisa dihentikan dan blokade kembali dibuka.

"Pukul 12.45 WIB jalan tol kembali dibuka setelah dilakukan pendorongan dan imbauan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi.

■ Bersambung ke Hal 11



Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Aksi unjuk rasa tersebut menuntut revisi undang-undang desa segera disahkan pada sidang paripurna yang akan dilaksanakan pada 6 Februari 2024 mendatang.

LUAR NEGERI

Inggris Beri Sinyal Akui Negara Palestina

Medan, MIMBAR - Inggris akan mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina demi mengakhiri agresi Israel di Gaza. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan langkah tersebut akan membantu menjadikan solusi dua negara sebagai proses mengakhiri agresi.

Pernyataan Cameron terungkap saat dia menghadiri acara Kedutaan Besar Arab Saudi di London pada Senin (29/1). "[Rakyat Palestina harus punya] cakrawala politik sehingga mereka bisa melihat akan ada kemajuan yang tak bisa diubah menuju solusi dua negara," kata Cameron, dikutip dari The Guardian.

"Kita harus mulai menentukan seperti apa negara Palestina nantinya -

■ Bersambung ke Hal 11



■ Tak lagi wakil rakyat ...
■ Hehehe ...



SULTAN IBRAHIM SULTAN ISKANDAR DARI JOHOR RESMI JADI RAJA MALAYSIA KE-17 :

Raja Malaysia ke-17, Sultan Ibrahim Sultan dari Johor memberi hormat kepada penjaga kehormatan, di samping Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim di Istana Nasional di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Januari 2024. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dari Johor resmi dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 menggantikan Sultan Abdullah dari Pahang. Raja Agong baru Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dipilih oleh rekan-rekan sultan Malaysia pada 27 Oktober 2023. Hal ini sejalan dengan tradisi monarki rotasi Malaysia yang unik. (Foto AFP)

Rombongan AMIN...

Dari Halaman 1

Mobil tersebut ringsek di bagian depan. Mobil tak bisa beroperasi kembali karena air radiator bocor. Sebuah mobil Avanza yang terlibat tabrakan ringsek di beberapa bagian. Ban cadangan mobil tersebut copot.

"Tabrakan beruntun tiga mobil, mobil penyok, tapi wartawan aman," ucap Irfan Kamil, wartawan Kompas.com yang ikut rombongan Anies, saat ditemui di Sumenep, Rabu (31/1).

"Tadi dikirim mobil baru untuk jemput wartawan," ujarnya.

Sementara itu, mobil-mobil lainnya melanjutkan perjalanan. Anies dan Muhamin pun tak terdampak kecelakaan beruntun itu. Mereka melanjutkan kunjungan dan makan siang di Pondok Pesantren Al Hamidy Banyuwangi.

ANIES SELAMAT

Juru Bicara Timnas AMIN Iwan Tarigan memastikan Anies Baswedan terhindar dari tabrakan beruntun rombongan yang terjadi di Sumenep, Madura.

"Bapak Anies dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari kecelakaan," kata Iwan dalam keterangannya, Rabu (31/1).

"Info sementara ada empat mobil tim yang ringsek. Ya Allah jauhkan capres kita beserta seluruh rombongan dari segala mara bahaya dan musibah," kata Iwan.(cnni/js)

Anwar Usman...

Dari Halaman 1

Anwar meminta PTUN memerintahkan atau mewajibkan Ketua MK selaku tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar ingin hakim PTUN mengabulkan seluruh gugatan yang dia mohonkan.

"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi gugatan Anwar, dikutip Rabu (31/1).

Selain itu, Anwar meminta PTUN mewajibkan Suharto selaku tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK. Anwar juga ingin Suharto membayar biaya perkara ini.

PTUN Jakarta pada Rabu ini menggelar sidang pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Adapun Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK setelah ada putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan ia melanggar etik berat pada putusan perkara 90 soal syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Ini dinilai terlibat benturan kepentingan karena putusan itu memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakannya maju di Pilpres 2024.

Anwar sempat mengajukan surat keberatan atas pengangkatan hakim konstitusi Suharto sebagai Ketua MK 2023-2028. Kuasa hukum Anwar menilai ada keengganan di putusan MKMK.

MK kemudian menjawab surat keberatan itu melalui surat Pimpinan MK yang ditandatangani oleh Ketua MK Suharto pada 22 November 2023. Kemudian, Anwar menggugat Suharto ke PTUN Jakarta. (cnni/js)

Inggris Beri...

Dari Halaman 1

seperti apa bentuknya, bagaimana cara kerjanya," ujar dia.

Cameron kemudian berkata, "Saat hal itu terjadi, kami bersama sekutu akan mempertimbangkan masalah pengakuan negara Palestina, termasuk di PBB."

Inggris bukan satu-satunya negara yang menyuarakan solusi dua negara.

Pada pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan negara Palestina di masa depan.

Desakan Biden muncul saat dia telepon dengan Netanyahu.

Netanyahu sementara itu, menolak gagasan kedaulatan Palestina dan menyatakan kebutuhan keamanan Israel tak sesuai dengan negara Palestina.

Israel melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober. Imbas serangan ini, lebih dari 27.000 jiwa meninggal dan puluhan ribu rumah penduduk hancur. (cnni/js)



Mengingat Kematian

Dari Halaman 1

Dari Abu Ta'ala Syidat bin Aus radhi Allah anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah adalah yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Di samping itu, ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah." (HR Tirmidzi).

Dalam Babu Dzikiril Mauti Wa Fadhlihi Wal Isti'dadi Lahu atau bab tentang mengingat kematian dan fadhilah mengingat kematian dan persiapan menghadapi kematian di kitab at-Tadzkirah dijelaskan, Abu Ubaid Al Qasim bin Salim al Baghdadi mengatakan, apa yang dimaksud dengan mengoreksi diri itu adalah menudukkan diri di hadapan Allah SWT serta menjalankan semua amal saleh.

Abu Ubaid juga menyebutkan, orang cerdas adalah orang yang tidak menyalahkan umur yang diberi Allah SWT. Mereka juga selalu mengingat dan patuh kepada Allah SWT dalam berbagai situasi dan kondisi. Semua hal itu merupakan bekal di akhirat.

Orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa sibuk dengan urusan duniawi, lupa akan kematian, berbuat curang dan merugikan orang lain, dan menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan dan kemenangan, seolah-olah dia merasa hidup selamanya dan memandang harta adalah bagian terpenting dalam hidupnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang pundakku, lalu berpesan: Jadilah di dunia ini sebagai seorang yang asing, atau seorang Musafir." (Al Bukhari, no. 6416)

Tentu saja dalam hidup ini tidak bisa melepaskan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhiran. Karena tanpa memikirkan kepentingan duniawi maka akan dapat membawa kemelatan. Namun demikian, gula dunia untuk dapat sebagai ladang amal berbuat kebaikan. (*)

Rektor Bentuk...

Dari Halaman 1

Pembentukan tim investigasi ini tertuang dalam Surat Tugas Nomor : B-046/Un.11.R/B.1.3.a/KP.01.1/01/2024, tertanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani Rektor UIN Sumut, Prof Dr Hj Nurhayati MAg. Dalam Surat Tugas itu, sebanyak 9 orang yang dimasukkan dalam Tim, ditugaskan untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran kegiatan penelitian di Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumut, Medan.

Rektor UIN Sumut, Prof Dr Hj Nurhayati MAg, dalam keterangannya, Selasa (30/01), mengatakan tujuan dibentuknya tim internal ini untuk menjawab persoalan yang sebenarnya.

"Saya tak ingin persoalan ini menjadi bola liar, sehingga menjadi konsumsi pemberitaan yang belum pasti kebenarannya," ujar Rektor.

Prof Nurhayati juga mengingatkan kepada tim agar dalam melakukan investigasi menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Ia menegaskan komitmennya untuk tegak lurus di atas koridor

hukum.

Sejak dilantik menjadi Rektor UINSU Mei 2023, Prof Nurhayati menyampaikan kepada seluruh civitas akademika UINSU untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku, sekaligus menjunjung tinggi etika ilmiah.

Namun pada saat yang sama, ia juga mewanti-wanti untuk tidak mudah menuduh orang melakukan pelanggaran atau tuduhan lainnya tanpa ada bukti yang benar-benar valid.

Kepada Tim Investigasi, Prof Nurhayati meminta untuk mengumpulkan informasi selengkap-lengkapinya dan melakukan komunikasi kepada pihak terkait guna memperoleh informasi yang utuh dan komprehensif.

Sementara Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sumut, Prof Dr H Akmal Tarigan MAg mengatakan, kasus ini terjadi antara tahun 2018-2019. Proses akreditasi program studi (prodi) Ilmu Komunikasi FIS UIN SU Medan dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2019 dengan terbitnya SK BAN-PT Nomor 819/

Guru-guru Besar...

Dari Halaman 1

Dalam 'Petisi Bulaksumur' yang dibacakan, mereka menyatakan telah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.

Dengan mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1).

Petisi tersebut dibacakan Koentjoro yang didampingi sejumlah guru besar lain di UGM dan juga unsur mahasiswa yang diwakili di antaranya oleh Ketua BEM KM Gielbran M. Noor. Petisi itu dibacakan dalam acara Mimbar Akademik

Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM, kemarin.

Adapun beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain, soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir; serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

Mereka menganggap itu semua sebagai wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

"Presiden Joko Widodo sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," demikian petikan bunyi petisi tersebut.

Jokowi, lanjutnya, semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM yang berbu-

ny: "...Bagi kami alimater kuberjanji setia. Kupuhi dharma bhakti 'tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara..."

Jokowi diketahui pula sebagai alumnus UGM, di mana dia merupakan jebolan Fakultas Kehutanan yang lulus pada 1985 silam.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti alimaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, para pencetus petisi itu menilai tindakan Jokowi justru dianggap menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan.

Bukan hanya penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, juga pada kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

"Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial," bunyi petisi itu. (cnni/js)

Mahfud Resmi...

Dari Halaman 1

Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Mahfud menjelaskan, langkah mundur dari Kabinet Indonesia Maju itu sudah jadi kesepakatan dengan calon presiden Ganjar Pranowo.

Menurutnya, pengunduran dirinya itu juga demi menghindari konflik kepentingan di Pilpres 2024. "Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," ucap Mahfud.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Mahfud telah bertemu dengannya pada Senin (29/1) malam. Mahfud, kata dia, meminta waktu untuk bertemu Presiden Jokowi.

ALASAN MAHFUD

Mahfud MD mengungkapkan alasan dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua pekan sebelum pemungutan suara Pilpres 2024.

"Saya katakan saya sudah lama sepakat untuk mundur tapi tunggu momentum. Itu apa, satu momen situasi yang tepat," kata Mahfud.

"Dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan masing-masing partai pengusung yang bekerja sama mengusung," ujarnya, menambahkan.

Ia mengaku sudah membuat surat pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam. Ia akan membawa surat tersebut sampai mendapat waktu untuk bertemu Jokowi.

Mahfud mengatakan, dirinya harus menyampaikan langsung ke Jokowi terkait keputusannya ini. Ia menyebut Jokowi lah yang telah mengangkat dirinya menjadi Menko Polhukam 4,5 tahun lalu.

"Karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati maka saya tidak akan tinggal gelandang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima dijadwalkan bertemu presiden," ujarnya.

Rekam Jejak...

Dari Halaman 1

Pria kelahiran Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957 itu kini menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Nama Mahfud juga pernah masuk ke dalam radar cawapres pendamping Presiden petahana Jokowi pada Pilpres 2019 silam. Namun, kala itu Jokowi justru memiliki calon lain yakni Ma'arif Amin, Ketua Umum MUI dan Rais Aam PBNU saat itu.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, menggantikan Jimly Asshiddique.

Berbagai kursi menteri pernah ia jabat, mulai dari menteri kehakiman dan hak asasi manusia, menteri pertahanan era Gus Dur, hingga kini dipercaya menjadi Menko Polhukam era Jokowi.

Sepak terjangnya sebagai Menko Polhukam kerap membantu menyelesaikan beberapa masalah hukum di tanah air.

Mahfud ditunjuk Jokowi memimpin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan.

Tim ini mengeluarkan rekomendasi salah satunya meminta adanya proses hukum pidana bagi pihak-pihak yang terbukti bersalah.

Pada April 2023, Mahfud mengungkap temuan transaksi janggal di Kementerian Keuan-

Tuntut Revisi...

Dari Halaman 1

Sebanyak 2.304 personel gabungan untuk mengamankan aksi tersebut. Unjuk rasa bertajuk 'Aksi Bersama Desa Jilid III' tersebut mengusung tuntutan revisi UU Desa.

BUBARKAN DIRI

Massa aksi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membubarkan diri setelah di-

janjikan bertemu dengan pimpinan DPR. Dalam demo kemarin, Apdesi menuntut DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa.

"Pimpinan desa akan bertemu pimpinan DPR untuk membahas revisi UU Desa," kata orator dari atas mobil komando.

"Teman-teman bisa membubarkan diri dengan tenang," lanjutnya.

Polisi sebelumnya sempat membuat barikade

gan (Kemenkeu) mencapai Rp349 triliun.

Mahfud kemudian membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut kasus tersebut.

Salah satu hasil signifikan dalam kerja Satgas TPPU adalah penanganan kasus impor emas dengan transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp189 triliun.

Kemudian, Mahfud membentuk tim percepatan reformasi hukum pada Mei 2023. Tim yang dipimpin Mahfud itu dibentuk untuk merespons perkembangan di masyarakat dengan mengajak akademisi hingga pakar memberi rekomendasi penyelesaian permasalahan hukum yang buntu di tengah jalan.(cnni/js)

untuk memukul mundur massa. Namun, perlawanan massa mulai membubarkan diri setelah mengetahui pimpinan DPR akan menemui perwakilan mereka.

Jalan Gatot Subroto yang sempat ditutup imbas demo ini juga telah kembali dibuka. Arus lalu lintas pun berangsur normal. Massa Apdesi juga sempat melempar botol air mineral ke arah aparat. Mereka juga sempat membakar ban di gerbang Gedung MPR/DPD.(cnni/js)